

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **4.1 Permasalahan Pembangunan**

##### **4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

1. Pendidikan:

- a. Masih rendahnya capaian Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten Pemalang pada anak usia dini yang sudah tamat atau sedang belajar PAUD, anak usia 12-15 tahun yang sudah atau sedang belajar, dan anak usia 7-18 tahun yang sedang dan sudah belajar pada pendidikan kesetaraan.
- b. Masih rendahnya APK PAUD Formal (TK/RA). Capaian APK PAUD formal pada tahun 2020 sebesar 70,00% lebih rendah apabila dibandingkan dengan target SPM yaitu sebesar 100%.
- c. Masih rendahnya ruang kelas PAUD sesuai dengan SNP, pada tahun 2020 baru mencapai 5,36%.
- d. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A/SDLB dan SMP/MTs/Paket B/SMPLB pada tahun 2020 masih rendah dan cenderung menurun. APS SD/MI/Paket A/SDLB sebesar 95,8% dan APS SMP/MTs/Paket B/SMPLB sebesar 83,60% lebih rendah jika dibandingkan target SDGs sebesar 100%. Masih tingginya kasus Anak Tidak Sekolah yaitu 36.213 anak usia 7-18 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar.
- e. Kondisi ruang kelas sesuai SNP masih rendah untuk jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs. Pada tahun 2020 Kondisi ruang kelas sesuai SNP 29,54% untuk SD/MI sedangkan untuk SMP/MTs hanya sebesar 34,08%. Masih cukup besar apabila ditargetkan bahwa ruang kelas sesuai SNP sebesar 100%.
- f. Belum semua sekolah SD/MI dan SMP/MTs terakreditasi minimal B, pada tahun 2020 persentase SD/MI terakreditasi Minimal B sebesar 95,50% dan SMP / MTs sebesar 90,96%.
- g. Guru yang memenuhi kualifikasi D IV/Sarjana dan bersertifikasi masih rendah yaitu sebesar 36,21% pada tahun 2020.

2. Kesehatan:

- a. Belum optimalnya penanganan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pemalang. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus kematian ibu dan bayi, walaupun dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Angka kematian ibu Tahun 2020 58,85 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan untuk angka kematian bayi dilaporkan sebanyak 5,14 per 1.000 kelahiran hidup.

- b. Belum optimalnya penanganan stunting di kabupaten Pemalang. Terlihat masih ditemukannya balita stunting sebesar 12,68% di tahun 2020 walaupun telah menunjukkan penurunan dibanding tahun lalu namun upaya pencegahan dan penanggulangan stunting harus tetap dilakukan melalui intervensi spesifik dan sensitive melalui perluasan lokus stunting hingga tahun 2026.
  - c. Masih rendahnya pencapaian indeks keluarga sehat di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Pemalang Tahun 2020 masih rendah tercatat sebesar 0,17. Penyebabnya keterbatasan SDM Kesehatan di puskesmas untuk pendataan dan perilaku keluarga yang tidak sehat.
  - d. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat (ber-PHBS) di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil pemantauan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat di tahun 2020 masih dalam kisaran sebesar 81,48%.
  - e. Belum optimalnya pelayanan terhadap penderita penyakit menular dan tidak menular sesuai standar SPM.
  - f. Belum terpenuhinya SDM Kesehatan sesuai standar dan belum optimalnya kualitas tenaga kesehatan di Kabupaten Pemalang, khususnya di puskesmas menjadi kendala dalam pelaksanaan program prioritas kesehatan. Belum optimalnya peran puskesmas dalam menempatkan upaya promotif dan preventif menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan masyarakat dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan angka kematian. Hal ini dilihat dari puskesmas akreditasi tahun 2020 sebesar 92%.
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang:
- a. Masih ditemukan jalan dan jembatan rusak, tahun 2020 kondisi mantap sebesar 68,66%
  - b. Masih ditemukan irigasi rusak, tahun 2020 irigasi kondisi baik sebesar 73,04%
  - c. Masih ditemukan drainase yang belum sesuai standar, tahun 2020 drainase dalam kondisi baik sebesar 72,16%
  - d. Belum terpenuhinya akses air minum, tahun 2020 penduduk yang memiliki akses air minum sebesar 86,20%
  - e. Belum semua RT terakses limbah domestik, tahun 2020 penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik sebesar 92,82%
  - f. Belum semua gedung dan bangunan lainnya memiliki IMB, tahun 2020 IMB yang diterbitkan sebanyak 177 IMB dan kepemilikan IMB sebesar 0,22%.
  - g. Belum semua jasa konstruksi memiliki sertifikat, tahun 2020 sebesar 18,01%.

- h. Belum optimalnya pengawasan dalam pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak terjadi pelanggaran perijinan
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman:
    - a. Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pemalang, capain tahun 2019 sebesar 17,17 %
    - b. Masih terdapat permukiman kumuh yang belum tertangani sebesar 1,63% pada tahun 2020;
    - c. Belum optimalnya penanganan korban bencana dan penduduk yang terkena relokasi program pemerintah yang seharusnya mendapatkan rumah layak huni dikarenakan pendataan yang kurang optimal.
    - d. Belum semua kawasan permukiman memiliki PSU dalam kondisi baik, hal ini karena pendataan yang kurang optimal.
    - e. Masih kurangnya kualitas rumah susun yang ada.
  5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat:
    - a. Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, yaitu dari seluruh gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi selama tahun 2020, yang dapat diselesaikan sebesar 75%.
    - b. Belum optimalnya penegakkan Perda dan Perbup, yaitu dari seluruh Perda dan Perbup yang mengandung sanksi, selama tahun 2020 yang dapat ditegakkan sebesar 56%.
    - c. Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yaitu dari seluruh kejadian kebakaran pada tahun 2020, yang dapat dilayani sebesar 65,52%.
    - d. Belum optimalnya pembentukan desa/kelurahan tanggap kebakaran, yaitu sampai dengan tahun 2020 belum terbentuk desa/kelurahan tanggap kebakaran.
    - e. Belum semua penduduk memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2020 sebesar 94%.
    - f. Belum semua penduduk memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, tahun 2020 baru sebesar 94%.
    - g. Belum semua penduduk memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, tahun 2020 baru sebesar 99,71%.
  6. Sosial:
    - a. Belum optimalnya pelayanan SPM Sosial dikarenakan belum adanya rumah singgah sesuai standar, data sasaran yang belum tersedia dengan baik, belum tersedianya Puskesmas
    - b. Updating data penduduk miskin melalui DTKS terkendala oleh jadwal yang ditentukan dari kementerian sosial.
    - c. Kampung siaga bencana belum optimal.
    - d. Belum ada psikososial/trauma healing.

- e. Belum semua PMKS yang ada di Kabupaten Pemalang tertangani, tahun 2020 baru sebesar 80,82%.
- f. Belum optimalnya penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, tahun 2020 baru sebesar 24,19%.
- g. Belum terpenuhinya taman makam pahlawan sesuai standart (belum memiliki tempat parkir yang memadai, belum ada perpustakaan, dll)

#### **4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

1. Tenaga kerja;
  - a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka, tahun 2020 sebesar 7,64%.
  - b. Rendahnya kompetensi tenaga kerja, sampai dengan tahun 2020 pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi sebesar 73,39%.
  - c. Kebutuhan pasar kerja tidak sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia.
  - d. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan yang menerapkan aturan ketenagakerjaan, tahun 2020 sebesar 19,04%.
  - e. Belum semua perusahaan mengikuti jamsostek, tahun 2020 baru sebesar 92,95%
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
  - a. Belum optimalnya implementasi Desa/kelurahan Layak Anak, tahun 2020 ada 18 desa layak anak.
  - b. Belum aktifnya seluruh kelembagaan PUG yang ada di Kabupaten, tahun 2020 baru sebesar 48,15%
  - c. Masih ditemukannya kasus kekerasan anak, tahun 2020 sebanyak 52 kasus.
  - d. Belum semua kecamatan layak anak, tahun 2020 baru 11 kecamatan.
3. Pangan:
  - a. Masih kurangnya bantuan cadangan pangan untuk bencana
  - b. masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan cadangan pangan
  - c. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pangan yang beragam, bergizi,seimbang dan aman (B2SA) yang berbasis keamanan lokal.
4. Pertanahan;
  - Masih adanya sengketa pertanahan yang belum terfasilitasi karena cakupannya yang luas.
5. Lingkungan hidup;

- a. Kualitas lingkungan yang cukup baik dilihat dari capaian indikator IKLH sebesar 68,58 di tahun 2020, namun perlu peningkatan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan ancaman degradasi lingkungan.
  - b. Masih tingginya pencemaran air dan udara, terlihat dari indeks kualitas air sebesar 47,33 dan indeks kualitas udara sebesar 85,62.
  - c. Masih belum optimalnya pengelolaan sampah, timbulan sampah yang dapat diangkut pada tahun 2020 sebesar 74,97 %
  - d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
  - e. Masih adanya kegiatan pembangunan yang belum dilengkapi dengan dokumen lingkungan.
  - f. Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati.
  - g. Belum optimalnya penanganan lahan kritis, sampai dengan tahun 2020 lahan kritis yang ditangani baru sebesar 0,0263 %
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:
- a. Masih adanya masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan, yaitu sampai dengan tahun 2020 kepemilikan dokumen kependudukan sebesar 73,11% meliputi kepemilikan KTP sebanyak 99,87%, kepemilikan KK sebanyak 98,44% dan kepemilikan KIA sebanyak 21,01%.
  - b. Masih adanya masyarakat yang belum mempunyai dokumen pencatatan sipil, yaitu sampai dengan tahun 2020 kepemilikan dokumen pencatatan sipil sebesar 88,98% meliputi kepemilikan akta nikah sebanyak 15,56%, kepemilikan akta kelahiran sebanyak 94,21% dan kepemilikan akta kematian 61,72%.
  - c. Masih rendahnya Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama, dimana sampai dengan tahun 2020 hanya sebanyak 4 OPD atau sebesar 10,26% OPD yang sudah melaksanakannya.
  - d. Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan, dimana sampai dengan tahun 2020 data kependudukan yang sudah update baru sebesar 98,85% dari data kependudukan yang dimohonkan update.
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- a. Belum optimalnya penataan desa, yaitu sampai dengan tahun 2020 capaian desa yang tertata sebesar 0,47% atau sebanyak 1 desa.
  - b. Masih rendahnya desa yang meningkat PADes nya dari hasil kerjasama desa, yang disebabkan belum optimalnya pelaksanaan kerjasama desa baik kerjasama antar desa, kerjasama antara desa dengan pihak ketiga dan kerjasama dalam kawasan perdesaan. Sampai dengan tahun 2020, desa yang meningkat PAD-nya dari hasil kerjasama desa sebesar 36,49% atau sebanyak 77 desa.

- c. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa, yaitu sampai dengan tahun 2020 belum ada desa yang mempunyai administrasi pemerintahan desa baik.
  - d. Masih rendahnya cakupan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM), sehingga sampai dengan tahun 2020 LKD dan LEM yang berdaya baru sebesar 15,61% atau sebanyak 33 lembaga.
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- a. Peserta KB aktif semakin menurun, pada tahun 2020 sebesar 70,84%
  - b. Masih banyaknya PUS yang tidak ber KB, tahun 2020 sebesar 10,12%
  - c. Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi, tahun 2020 sebesar 2,51%.
  - d. Masih kurangnya jumlah PLKB dibandingkan dengan jumlah desa, tahun 2020 sebesar 2,45%.
9. Perhubungan;
- a. Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan jalan berpotensi menjadi daerah rawan kecelakaan lalu lintas
  - b. Tingginya potensi kecelakaan yang disebabkan belum lengkapnya pemenuhan fasilitas keselamatan dan rendahnya kendaraan umum yang memenuhi aspek/ standar keselamatan
  - c. Masih rendahnya tingkat konektivitas angkutan umum di Kabupaten Pemalang
  - d. Masih rendahnya tingkat konektivitas dan aksesibilitas transportasi yang disebabkan karena belum semua wilayah telah terlayani dengan angkutan umum dan rendahnya kinerja simpul transportasi di terminal
  - e. Potensi kemacetan di perkotaan yang disebabkan potensi parkir terkelola dengan baik.
10. Komunikasi dan informatika;
- a. Belum optimalnya capaian keterbukaan informasi publik, tahun 2020 Indeks keterbukaan informasi publik sebesar 74,5.
  - b. belum optimalnya pengelolaan media komunikasi pemerintah daerah, tahun 2020 baru sebesar 9,1% penduduk yang mengakses media milik pemerintah.
  - c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana komunikasi
  - d. Belum semua penduduk terlayani layanan mobile broadband, tahun 2020 sebesar 94%
  - e. belum optimalnya pengelolaan opini, aspirasi, dan aduan masyarakat, tahun 2020 baru sebesar 72%

- f. Belum semua SDM ASN memiliki kompetensi pengelolaan informasi publik, tahun 2020 sebesar 60%.
  - g. Belum optimalnya kepatuhan pada pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tahun 2020 indeks SPE 3,34.
  - h. Belum semua jaringan komputer terintegrasi dengan data center, tahun 2020 sebesar 70,73%
  - i. Belum semua aplikasi layanan publik terintegrasi, tahun 2020 sebesar 41,17%.
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- a. Masih rendahnya capaian koperasi sehat, tahun 2020 koperasi sehat sebesar 27,56%
  - b. Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil, tahun 2020 sebesar 0,053%.
12. Penanaman modal;
- a. Belum Optimalnya perkembangan dan pertumbuhan investasi (PMA dan PMDN).
  - b. Belum optimalnya promosi investasi dalam rangka meningkatkan penanaman modal dikarenakan Kabupaten Pemalang belum memiliki kawasan industri.
  - c. Belum adanya insentif yang memadai bagi investor.
  - d. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu, tahun 2020 sebesar 27,61%
  - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat UMKM untuk mendaftarkan usahanya,
  - f. Belum adanya pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam Mall Pelayanan Publik.
13. Kepemudaan dan olah raga;
- a. Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengembangan olah raga rekreasi.
  - b. Belum optimalnya program pengembangan kewirausahaan pemuda, tahun 2020 sebesar 0,05% pemuda menjadi wirausaha pemula.
  - c. Belum optimalnya pembinaan atlet, pelatih dan SDM keolahragaan
  - d. Belum optimalnya organisasi keolahragaan
14. Statistik:
- a. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data statistik sektoral
  - b. Belum optimalnya penerapan single data melalui aplikasi satu data.
15. Persandian:
- a. Kurangnya kompetensi SDM yang menangani persandian dan telekomunikasi.
  - b. Belum semua konten informasi telah diamankan, tahun 2020 sebesar 41,07%



16. Kebudayaan:

- a. Belum optimalnya pengelolaan warisan budaya tak benda, yaitu sampai dengan tahun 2020, hanya 59 obyek warisan budaya tak benda yang sudah teregistrasi.
- b. Belum optimalnya pengelolaan sejarah Pemalang, yaitu sampai dengan tahun 2020, hanya 7 sejarah Pemalang yang sudah teregistrasi.
- c. Belum optimalnya pengelolaan warisan budaya benda, yaitu sampai dengan tahun 2020, hanya 92 warisan budaya benda yang sudah teregistrasi

17. Perpustakaan:

- a. Masih minimnya perpustakaan yang sudah sesuai standart nasional, disebabkan belum optimalnya pengelolaan perpustakaan, yaitu sampai dengan tahun 2020 hanya terdapat 0,59% perpustakaan sudah sesuai standart nasional atau sebanyak 7 perpustakaan.
- b. Masih rendahnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yaitu pada tahun 2020 sebesar 55,25%.
- c. Belum optimalnya pelestarian naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara. Pelestarian naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara membutuhkan perlakuan khusus dan masih ada naskah kuno serta koleksi budaya etnis nusantara yang belum disimpan di Dinpusarda Kabupaten Pemalang. Sampai dengan tahun 2020, terdapat 8 eksemplar naskah kuno dan 50 eksemplar koleksi budaya etnis nusantara atau masih sebesar 55,50%.

18. Kearsipan:

- a. Belum optimalnya pengelolaan arsip, yaitu pada tahun 2020 tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja hanya sebesar 7,12%.
- b. Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip, yaitu pada tahun 2020 tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban hanya sebesar 5,45%.
- c. Belum optimalnya penerbitan izin penggunaan arsip tertutup, yaitu sampai dengan tahun 2020 belum ada pengajuan izin penggunaan arsip tertutup yang diajukan ke Dinpusarda Kabupaten Pemalang.

#### **4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

1. Kelautan dan perikanan;

- a. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya. Hal ini terlihat dari produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 baru mencapai sebanyak 17.800.168 kg.
- b. Terjadinya fluktuasi produksi perikanan tangkap. Hal ini terlihat dari produksi perikanan tangkap yang meski menunjukkan peningkatan

- kinerja pada tahun 2020 menjadi 18.096.881, namun masih di bawah capaian Tahun 2016-2017 pada kisaran 26.000 – 27.000 ton.
- c. Belum seluruh TPI sesuai dengan standar. Hal ini terlihat dari persentase TPI yang memenuhi standar pada tahun 2020 baru mencapai 64%.
  - d. Belum optimalnya produksi hasil olahan perikanan, hal ini terlihat dari produksi hasil olahan perikanan tahun 2020 sebesar 11.360.484 kg disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dibanding produk substitusinya. Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Pemalang tahun 2020 sebesar 34,46 kg/kap/th, lebih rendah dari konsumsi nasional 55,95 kg/kapita/tahun dan konsumsi Jawa Tengah sebesar 33,8 kg/kapita/tahun.
  - e. Masih rendahnya unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan. Hal ini terlihat dari persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan baru mencapai 48,87% pada tahun 2020.
2. Pariwisata;
- a. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, terbukti selama 2016-2020 hanya terdapat 1 byek wisata unggulan.
  - b. Belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap PAD, pada tahun 2020 menurun menjadi 0,40%.
  - c. Belum optimalnya peran Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata, tahun 2020 baru terdapat 11,11% desa wisata maju.
  - d. Masih kurangnya promosi pariwisata
  - e. Belum semua sektor ekonomi kreatif terimplementasi.
  - f. Belum semua pelaku ekraf teregistrasi, tahun 2020 sebesar 45,60%.
  - g. Belum optimalnya kualitas SDM kepariwisataan (tenaga kerja kepariwisataan dan biro perjalanan) terbukti tenaga kerja kepariwisataan yang memiliki sertifikat standar kompetensi baru sebanyak 19 orang dan belum ada biro perjalanan yang memiliki sertifikasi/kualifikasi.
3. Pertanian;
- a. Lokasi lahan yang mempunyai irigasi teknis namun dalam perda RTRW dijadikan kawasan permukiman dan Industri.
  - b. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok tani dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas petani, tahun 2020 kelompok tani aktif sebesar 30%.
  - c. Belum dimplementasikannya insentif dan disinsentif pada Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B)
  - d. Belum tercukupinya sarana pertanian/peternakan;



- e. Belum optimalnya penanggulangan bencana pertanian, tahun 2020 sebesar 7,6%.
  - f. Belum tercukupinya prasarana pertanian, tahun 2020 prasarana pertanian dalam kondisi baik sebesar 65%.
  - g. Kurangnya informasi keberadaan RPH.
  - h. Adanya lahan pertanian yang terdampak rob.
4. Perdagangan;
- a. Belum optimalnya kontribusi perdagangan dalam PDRB, tahun 2020 sebesar -3,49%
  - b. Nilai ekspor non migas belum optimal pertumbuhannya
  - c. Belum maksimalnya retribusi pasar dalam PAD, tahun 2020 sebesar 2,67%.
  - d. Belum memiliki pasar tradisional dengan kriteria pasar sehat
  - e. Perlindungan konsumen masih belum optimal hal ini dapat dilihat dari persentase UTTP yang ditera ulang, tahun 2020 sebesar 3,16%.
5. Perindustrian;
- a. Belum optimalnya pembinaan IKM
  - b. Belum optimalnya perkembangan kluster industri
6. Transmigrasi.
- Masih terdapat calon transmigran yang tidak/ belum diberangkatkan ke lokasi transmigrasi karena terbatasnya kuota transmigrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi.

#### **4.1.4. Urusan Penunjang Pemerintah**

1. Perencanaan;
- a. Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi daerah sehingga pada tahun 2020 keselarasan antara indikator kinerja RKPD dengan indikator kinerja RPJMD sebesar 99,49%.
  - b. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM sehingga pada tahun 2020 keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 82,14%.
  - c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA sehingga pada tahun 2020 keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 85,71%.
  - d. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW sehingga pada tahun 2020 keselarasan dokumen perencanaan pembangunan

perangkat daerah rumpun bidang IPW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 83,33%.

2. Keuangan;

- a. Belum optimalnya pengamanan aset daerah, dari 2286 bidang tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Pemalang, yang sudah bersertifikat sebanyak 807 bidang atau sebesar 35,30% sehingga masih ada kekurangan sebanyak 1479 bidang yang belum bersertifikat.
- b. Belum optimalnya pendapatan asli daerah. Hal ini terlihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan baru mencapai sebesar 12,72% pada tahun 2020.
- c. Belum terpenuhinya pengalokasian anggaran pada sebagian urusan wajib pelayanan dasar yaitu belanja infrastruktur yang sesuai dengan ketentuan.

3. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- a. Belum optimalnya kompetensi ASN (structural, pelaksana dan fungsional), tahun 2020 sebesar 7,24%.
- b. Belum optimalnya kinerja ASN
- c. Tingkat kedisiplinan ASN masih belum optimal, tahun 2020 sebesar 62,5%.
- d. Belum optimalnya penempatan ASN berdasarkan kompetensi, sebesar 8,75%.

4. Penelitian dan pengembangan;

- a. Masih rendahnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk perencanaan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 80%.
- b. Masih rendahnya inovasi daerah, yaitu pada tahun 2020 Indeks Inovasi Daerah sebesar 796.

5. Pengawasan

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan, yaitu pada tahun 2020 penyelenggaraan pengawasan sesuai PKPT yang terlaksana hanya sebesar 80,54%.
- b. Belum optimalnya pendampingan dan asistensi kepada instansi yang membutuhkan, yaitu pada tahun 2020 cakupan pendampingan dan asistensi sesuai PKPT yang terlaksana hanya sebesar 70%.

6. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Masih banyak masyarakat yang belum paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Sampai dengan tahun 2020, dari seluruh target peserta pendidikan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang diadakan oleh Bakesbangpol, baru sebanyak 75% yang mengikuti pendidikan tersebut.

- b. Masih banyak masyarakat yang belum paham politik. Sampai dengan tahun 2020, dari seluruh target peserta pendidikan politik yang diadakan oleh Bakesbangpol, baru sebanyak 40% yang mengikuti pendidikan tersebut.
- c. Kurangnya peran organisasi kemasyarakatan dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2020, hanya sebanyak 50% ormas yang aktif berpartisipasi dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
- d. Masih banyak masyarakat yang belum paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial. Sampai dengan tahun 2020, dari seluruh target peserta pendidikan kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial yang diadakan oleh Bakesbangpol, baru sebanyak 50% yang mengikuti pendidikan tersebut.
- e. Masih banyak masyarakat yang belum paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Sampai dengan tahun 2020, dari seluruh target peserta pendidikan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang diadakan oleh Bakesbangpol, baru sebanyak 45% yang mengikuti pendidikan tersebut.

#### 7. Sekretariat DPRD

- a. Perlunya disediakan dukungan untuk layanan DPRD sehingga untuk tahun-tahun mendatang layanan keuangan, kesejahteraan dan administrasi DPRD dapat tersedia 100%.
- b. Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD, yaitu sampai dengan tahun 2020 dukungan yang tersedia sebesar 82,33% meliputi Perda yang ditetapkan tepat waktu hanya sebanyak 55,55%, kebijakan anggaran yang dibahas tepat waktu sebanyak 75,57%, hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti sebanyak 81,4%, kode etik DPRD yang diimplementasikan sebanyak 100%, dan fasilitasi tugas DPRD sebesar 99,12%.
- c. Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD, yaitu sampai dengan tahun 2020 dukungan yang tersedia sebesar 56,93% meliputi anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya sebanyak 91,63%, jenis aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti sebanyak 79,15% dan kerjasama daerah yang disetujui sebanyak 0%.

#### 8. Sekretariat Daerah

- a. Belum optimalnya pendokumentasian pelaksanaan pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan belum tersedianya data indeks pelaksanaan pembangunan daerah.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan tertib administrasi tata pemerintahan.



- c. Masih rendahnya implementasi pengadaan secara elektronik
- d. Belum optimalnya pencapaian reformasi birokrasi, tahun 2020 sebesar 60,20.
- e. Masih rendahnya peningkatan inovasi dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, tahun 2020 sebesar 10%
- f. Belum optimalnya nilai Sakip, tahun 2020 sebesar 65,81.

#### 9. Kewilayahan

- a. Belum optimalnya pelayanan publik yang dilaksanakan di kecamatan, yaitu pada tahun 2020 sebesar 87,30%. Adapun pelayanan publik yang dilaksanakan meliputi penyediaan data dan informasi pemerintahan, pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan pelayanan yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan. Pada tahun 2020, masyarakat desa dan kelurahan yang aktif sebesar 94,69%.
- c. Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Pada tahun 2020, dari seluruh gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di tingkat desa dan kecamatan, masih ada sebesar 0,86% gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tidak dapat ditangani.
- d. Masih terjadi potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan. Pada tahun 2020, masih terdapat 14 potensi konflik namun potensi konflik yang terjadi tersebut dapat diselesaikan dengan baik lewat koordinasi di tingkat kecamatan.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa. Sampai dengan tahun 2020 persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan desa baik hanya sebesar 66,63%.

## 4.2. Isu Strategis

### 4.2.1. Isu Strategis Dalam Dokumen RPJMN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Berikut ini misi dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia



2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dalam melaksanakan misi di atas dalam dokumen RPJMN terdapat 7 arahan kebijakan nasional:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah, 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang, 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif, 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas,

adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; 6) Pengentasan kemiskinan; dan 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa, 2) Memajukan kebudayaan, 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama, 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga 5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK, 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien, 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta 3) Pembangunan Rendah Karbon.



7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil, 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber, 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi. 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di Iuar negeri

MISI PRESIDEN		ARAHAN PRESIDEN		7 AGENDA PEMBANGUNAN	
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1	Pembangunan SDA		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2	Pembangunan Infrastruktur		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	3	Penyederhanaan Regulasi		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4	Penyederhanaan Birokrasi		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	Kesegaran Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	5	Transformasi Ekonomi		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bersahabat, dan Terpercaya				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7	Pertumbuhan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
9	Geografi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan				Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas**

Isu strategisnya adalah ;

**a. Keberlanjutan Sumber Daya Alam**

Ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan makin berkurang. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa.

**b. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi**

Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam.

**c. Transformasi Struktural Berjalan Lambat**

Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat



krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015. Kondisi ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang tidak bagus, kualitas investasi rendah dimana proporsi PMDN masih lebih rendah dibandingkan dengan PMA, peningkatan kualitas UMKM belum optimal.

#### **d. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital**

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang.

### **2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Tantangan pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 adalah mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi Jawa dan luar Jawa meningkatkan keterpaduan antar-provinsi dalam satu pulau dan antar-pulau di bidang ekonomi, sosial-budaya dan sarana dan prasarana.

### **3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing**

#### **a. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan**

Jumlah penduduk usia produktif yang besar tersebut harus dimanfaatkan agar Indonesia dapat memaksimalkan bonus demografi. Apabila tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan. Dalam pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terdapat pemalangan dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK.

#### **b. Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk**

Belum semua penduduk miskin dan rentan memperoleh jaman perlindungan sosial.

#### **c. Pemenuhan Layanan Dasar**

Belum semua penduduk mendapatkan layanan dasar sesuai standar. Hal ini dapat dilihat dari derajat kesehatan yang belum optimal, kematian ibu, stunting masih ditemukan di Indonesia. Belum semua penduduk mendapatkan layanan pendidikan.



**d. Peningkatan kualitas anak perempuan dan pemuda**

Intervensi berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan tahap kehidupan dan karakteristik individu diperlukan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Anak, perempuan, dan pemuda merupakan kelompok penduduk yang memiliki kriteria spesifik sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda demi menjamin kualitas hidup mereka. Pemenuhan hak dan perlindungan anak penting untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberdayaan dan perlindungan perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan mereka dalam setiap sektor pembangunan. Sementara itu, pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

**e. Pengentasan kemiskinan**

Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat

**f. Peningkatan Produktifitas dan daya saing**

Produktivitas dan daya saing manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan.

**4. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa**

- a. Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa.
- b. Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia.
- c. Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti.
- d. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama.
- e. Belum kukuhnya kerukunan umat beragama.
- f. Rendahnya budaya literasi.
- g. Belum optimalnya peran keluarga.

**5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi & Pelayanan Dasar**

- a. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau. Masih terbatas ketersediaan perumahan yang layak, masih kurangnya sanitasi dan air minum yang layak.
- b. Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan Masih Terbatas.
- c. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur.
- d. Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.
- e. Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi.
- f. Konektivitas Transportasi Jalan.
- g. Infrastruktur perkotaan meliputi transportasi, kualitas jalan dan fasilitas transformasi digital.

**6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, & Perubahan Iklim**

- a. Belum tercapainya indeks kualitas lingkungan hidup.
- b. Ketahanan bencana dan perubahan iklim.

**7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**

- a. Regulasi yang Disharmoni Inkonsisten Tumpang Tindih Multitafsir.
- b. Pemberantasan korupsi belum optimal.
- c. Indeks profesionalisme ASN.
- d. Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta public dalam pemerintah.
- e. Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal, efektif dan berintegritas.
- f. Pelayanan Publik yang berkualitas dengan berorientasi pada perbaikan social ekonomi berkelanjutan.

Disamping RPJMN, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang, terdapat kebijakan nasional di wilayah Kabupaten Pemalang yaitu:

1. Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Pemalang

Berupa program pembangunan Jaringan Air Baku Pulosari Kabupaten Pemalang yang akan mengambil air dari sumber mata air di Kabupaten Banyumas di sekitar Desa Ketenger Kecamatan Baturraden. Air dari sumber akan dialirkan melalui pipa sepanjang sekitar 15 Km dan akan melewati hutan milik Perhutani KPH Banyumas Timur dan KPH Pekalongan Barat.

Pembangunan dari sumber mata air sampai dengan reservoir akan dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana dengan dana APBN Tahun 2022, sedangkan dari reservoir ke sambungan rumah akan dilakukan oleh Pemkab Pemalang melalui DPU-TR ataupun Perumda Air Minum Tirta Mulia. Pada saatnya nanti pengoperasian SPAM tersebut akan dilakukan oleh Perumda AM Tirta Mulia.

2. Pembangunan Bendungan Karanganyar Kabupaen Pemalang

Program Pembangunan Bendungan Karanganyar di Kabupaten Pemalang direncanakan berlokasi di Kecamatan Bantarbolang dan diperkirakan akan berdampak pada 5 (lima) desa yaitu Desa Karanganyar, Desa Suru, Desa Sumurkidang, Desa Wanarata dan Desa Banjarsari. Berkaitan dengan rencana pembangunan ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal ini DPU-TR Kabupaten Pemalang telah melaksanakan studi awal untuk sosialisasi dan menangkap respon masyarakat terkait dengan rencana pembangunan bendungan dan

gambaran dampak yang akan terjadi. Pada Tahun 2020 DPU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan proses Penyusunan Pra FS. Adapun studi FS dan pembangunan fisik akan dilakukan oleh BBWS Pemali Juana.

3. Penanganan Kerusakan Pantai Kabupaten Pemalang

Pekerjaan ini akan difokuskan pada penanganan kerusakan pantai (rob) di wilayah Kecamatan Ulujami. DPU SDA Taru Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sedang menyusun DD Penanganan Kerusakan Pantai Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal untuk memperdalam studi yang telah dilakukan oleh DPU-TR dan BPBD Kab. Pemalang. Pembangunan fisik direncanakan akan dilakukan oleh BBWS Pemali Juwana dengan dana APBN, berupa polder, tanggul pantai, tanggul sungai, pintu air dan penanganan teknis lainnya (pompa air).

4. Pembangunan Kawasan Energi Terpadu Kabupaten Pemalang

Bersifat investasi murni swasta akan berupa Kawasan Industri Energi Terpadu berlokasi di kawasan pantura Kecamatan Petarukan. Telah diterbitkan izin prinsip kepada pihak investor namun belum terdapat upaya pembangunan lebih lanjut. Investor sedang menjajaki kerjasama investasi dengan berbagai perusahaan, namun tampaknya banyak yang terdampak covid-19.

Lahan ex tanah HGU Mc Kenzie dan pengadaan lahan dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten berkomitmen menyediakan jalan tembus dari lokasi ke jalan arteri pantura, menyediakan suplai air baku dan berbagai kemudahan investasi.

5. Pembangunan Pasar Pagi Kabupaten Pemalang

Rencana Pembangunan Pasar Pagi Kabupaten Pemalang yang baru berlokasi di Kelurahan Mulyoharjo-Pelutan, Kecamatan Pemalang saat ini dalam :

- Status Strategis (Quickwin)
  - Belum masuk dalam RKP Nasional Tahun 2022
  - Readines criteria telah siap dengan lahan milik Pemkab Pemalang
- Penanggungjawab proyek adalah Kementerian PUPR dengan dana APBN.

6. Pembangunan STA Kabupaten Pemalang

Pembangunan Sub Terminal Agribisnis (STA) Kabupaten Pemalang akan berlokasi di Kecamatan Pulosari. Akan dibangun oleh Kementerian Pertanian/ PUPR dengan dana APBN.

Penyediaan lahan akan dilakukan oleh Pemkab Pemalang beserta studi pendukung.

7. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong Kabupaten Pemalang

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong Kabupaten Pemalang dibangun pada tahun 2021 dengan anggaran Dana alokasi Khusus (DAK) dengan proges kegiatan :



- Volume 1.052 m<sup>2</sup> dengan nilai anggaran 2.922.456.000 (DAK).
- Status pelaksanaan pembangunan.
- Penanggung jawab proyek adalah Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
- Pemenang Tender PT. Putra Nangro Aceh.

#### **4.2.2. Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024**

Isu Strategi RPJMD Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan wilayah.
2. Penanggulangan Kemiskinan.
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam.
5. Kedaulatan pangan dan energi.
6. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

Arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa menjadi acuan dalam kebijakan pembangunan daerah dengan penyesuaian sesuai kewenangan dan kondisi Kabupaten Pemalang, sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi Pemalang yang berbasis agraris cukup bagus terbukti kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 jauh lebih baik dibanding kondisi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Namun kondisi ini masih menyimpan persoalan yang mendasar dengan tingginya angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan rendahnya capaian IPM.

Untuk itu dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pemalang disamping mengarahkan kepada investasi padat modal, juga mempertimbangkan pemerataan bagi masyarakat dengan kegiatan/ investasi padat karya. Sehingga nanti nilai tambah dari setiap investasi publik maupun swasta dapat turut serta menanggulangi kemiskinan.

2. Kesenjangan adalah sumber utama terjadinya permasalahan sosial yang bersifat horisontal maupun vertikal. Pembangunan wilayah dilakukan di seluruh pelosok wilayah dengan mempertimbangkan potensi unggulan wilayah. Namun hal ini tidak mengarahkan pada keseragaman wilayah, kawasan bersifat rural tidak harus seluruhnya dikembangkan menjadi urban. Pengembangan wilayah sesuai karakteristik wilayah masing-masing merupakan faktor penentu untuk mencegah terjadinya kesenjangan antar wilayah yang semakin melebar.
3. Kabupaten Pemalang memiliki kondisi wilayah agraris yang berlimpah sumber daya alamnya, hal ini senyatanya menjadi keuntungan potensial namun seringkali menyebabkan ketergantungan penduduk yang berakibat kurangnya daya saing sumber daya manusia. Kebijakan peningkatan capaian IPM harus dilakukan secara komprehensif, terarah

dan terpadu. Keunggulan potensial daerah harus diimbangi dengan keunggulan kompetitif berbasis sumberdaya manusia. Hal ini juga sekaligus untuk menjawab isu ketahanan pangan yang menghadapi tantangan besar akibat tenaga kerja pertanian sebagian besar telah lanjut usia.

4. Kebudayaan merupakan jati diri bangsa, sehingga gempuran budaya global di era keterbukaan informasi ini harus dapat disaring. Jati diri bangsa yang bersifat positif harus tetap dipertahankan, tanpa menutup diri dari pergaulan dunia. Generasi muda yang sedang mencari jati diri senantiasa rawan mengalami gegar budaya. Karakteristik positif seperti: disiplin, tekun, gigih, jujur, taat hukum dan aturan harus diimbangi dengan etos kemajuan dan etika kerja, serta berani bersaing secara terbuka.

Pembangunan karakter masyarakat Kabupaten Pemalang dapat dilaksanakan secara terpadu melalui: penguatan ketahanan budaya daerah, pengembangan seni budaya, pengamalan nilai agama dan peningkatan budaya literasi.

5. Kondisi infrastruktur transportasi utama (jalan) merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan daerah. Konektivitas transportasi menuju pasar, sekolah, rumah sakit merupakan hal yang harus diprioritaskan.

Kabupaten Pemalang juga seharusnya meningkatkan infrastruktur jalan di samping infrastruktur irigasi dan perkotaan lainnya, khususnya untuk menjamin aksesibilitas menuju fasilitas perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Konektivitas berbasis teknologi informasi sudah selayaknya dikembangkan sejalan dengan peningkatan kebutuhan IT pemerintah daerah dan masyarakat.

6. Kebijakan pembangunan daerah yang pro-investasi harus disertai kesadaran akan dampak penurunan kualitas air, udara dan tutupan lahan. Di samping itu harus mempertimbangkan juga resiko bencana dan perubahan iklim. Kebijakan pengendalian dampak lingkungan maupun upaya pemantauan pengelolaan lingkungan hidup harus tetap dikuatkan, termasuk di dalamnya pemantauan pengurangan timbulan gas karbon, sampah dan limbah B3.

7. Tata kelola pemerintah daerah yang baik dan transparan disertai kemudahan akses informasi dan layanan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut senyatanya menjadi tanggungjawab bersama jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif dan juga peran pers dan pemuka agama. Dalam era sekarang hal ini juga akan dipengaruhi juga oleh jurnalisme warga melalui media sosial. Kebijakan tata kelola pemerintah daerah harus senantiasa ditingkatkan dan seyogyanya tidak tersingkir/ terasing dari kecenderungan yang berlangsung di masyarakat.

#### 4.2.3. Isu Strategis Kabupaten Pemalang 2021-2026

Berdasarkan analisis permasalahan dan tantangan maka isu strategis Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut ini :

##### 1. **Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kesetaraan gender dan pencapaian pelayanan dasar.**

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia belum optimal. IPM pada tahun 2020 menjadi sebesar 66,32 masih di bawah rata-rata Jawa Tengah dan nasional. Beberapa hal layak diduga menyebabkan kualitas SDM belum optimal:

###### a. Pendidikan yang belum optimal.

Beberapa permasalahan di Kabupaten Pemalang di bidang pendidikan adalah masih rendahnya SPM pendidikan, masih rendahnya rata-rata lama sekolah, angka putus sekolah yang masih cukup tinggi, angka melanjutkan yang masih kurang. Pendidikan vokasi yang belum terlaksana dalam rangka meningkatkan ketrampilan bagi anak sekolah. Pendidikan dasar sudah merata disemua wilayah. Namun demikian kualitas pendidikan masih belum merata, kesenjangan masih terasa antara daerah atas dan daerah bawah, kualitas guru menjadi permasalahan.

###### b. Derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal

Masih ditemukannya angka kematian pada ibu melahirkan, bayi dan balita. Angka kesakitan di Kabupaten Pemalang masih cukup tinggi baik penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS, Kusta, Filariasi) maupun penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Mellitus, Kanker, Jantung). Kondisi ini dikarenakan perilaku masyarakat yang kurang sehat, lingkungan yang tidak sehat dan pelayanan masih belum optimal. Pendekatan Keluarga Sehat merupakan salah satu solusi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Perwujudan keluarga sehat masih menjadi prioritas dalam tahun ke depan. Masih berlangsungnya pandemi Covid 19 sejak tahun 2020 merupakan tantangan untuk meningkatkan PHBS masyarakat.

###### c. Tenaga Kerja yang belum mampu menjawab kebutuhan pasar

Kabupaten Pemalang telah mengalami bonus demografi, dimana penduduk usia produktif memiliki jumlah yang lebih besar 2 kali lipat dibandingkan usia tidak produktif. Kondisi ini dapat menjadi potensi dan ancaman. Kualitas penduduk usia produktif yang baik akan meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Pemalang, Namun apabila usia produktif tidak berkualitas banyak pengangguran maka ini akan menambah beban bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pengangguran di Kabupaten Pemalang masih tinggi, urusan tenaga

kerja memiliki tugas untuk meningkatkan ketrampilan calon tenaga kerja sesuai dengan Kebutuhan pasar. Tingkat Pengangguran Pemalang pada tahun 2020 sebesar 7,54%, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,48% dan Nasional sebesar 7,07% Kesiapan masyarakat Kabupaten Pemalang untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat masih terbatas

d. Kualitas Pelayanan Dasar belum optimal

Masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan limbah, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan dampak program pembangunan. Pelayanan dasar lain adalah pada ketentraman, kertiban dan perlindungan masyarakat serta sosial. Belum semua SPM tercapai 100%

e. Kualitas Perempuan, anak dan pemuda yang masih belum optimal

Kesetaraan dan keadilan gender adalah isu dalam pembangunan kualitas perempuan. Indeks Pemberdayaan perempuan (IPG) masih belum optimal, masih terjadi kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kekerasan pada perempuan dan anak Peran pemuda dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Pemuda harus memiliki prestasi termasuk prestasi olahraga. Capaian IPG Kabupaten Pemalang tahun 2020 adalah 85,83 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,18 dan Nasional sebesar 91,06. Dibandingkan dengan capaian IPG kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah posisi Kabupaten Pemalang berada paling rendah.

f. Pemajuan Budaya dan peningkatan Minat Baca

Menjadi SDM yang maju dan unggul harus memiliki karakter budaya dan pengetahuan yang baik. Minat baca menjadi alat ukur terkait dengan peningkatan kualitas SDM.

## **2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi.**

Peningkatan pertumbuhan ekonomi menurut RPJMN, Kabupaten Kota ditargetkan pada tahun 2024 adalah 6%, namun Jawa Tengah menargetkan kabupaten kota menjadi 7%. Namun dalam perjalanannya pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami pelambatan bahkan di tahun 2020 sebesar -2,07%. Beberapa hal yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi adalah ekspor yang menurun, transportasi yang menurun dan daya beli yang turun. Beberapa hal yang juga terpengaruh dengan kondisi pandemic COVID 19 di perekonomian adalah:

- a. Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah, Industri pengolahan  
Masih belum optimalnya perkembangan usaha mikro menjadi kecil tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 7%. Masih banyak wirausaha skala mikro kekurangan modal, ketrampilan belum optimal dan pemasaran yang belum dilakukan.  
Koperasi belum mampu memberikan akses permodalan pada wirasusaha mikro. Masih ada koperasi yang tidak aktif dan koperasi tidak sehat yang akan menjadi target pembangunan kedepan.  
Sentra sentra industri yang dibentuk harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Kota Sekitar. Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan sentra industri menjadi permasalahan tersendiri di Kab. Pemalang.
- b. Penanaman Modal  
Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investasi yang ada di Kabupaten Pemalang menjadi tantangan dalam pembangunan ke depan. Mempermudah pelayanan perijinan untuk investor yang terintegrasi dalam Mall Pelayanan Publik adalah langkah kedepan dalam meningkatkan investasi.
- c. Pertanian Perkebunan dan Perikanan  
Berkurangnya lahan pertanian, prkebunan dan pertanian menjadi tantangan bagi Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan produksinya. Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi, dan penciptaan inovasi bidang pertanian perkebunan dan perikanan.
- d. Perdagangan, perhotelan, pariwisata  
Potensi ekspor di Kabupaten Pemalang belum optimal dalam pengembangannya, hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor. Potensi lain yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah jasa perhotelan dan pariwisata. Pengembangan destinasi wisata merupakan pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan. Ekonomi kreatif juga belum mampu mendongkrak pariwisata

### **3. Masih Tingginya Kesenjangan antar wilayah**

Terutama disebabkan oleh kualitas Infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan antar wilayah yang belum terkoneksi dan kualitas lingkungan hidup yang belum optimal.

Kualitas infrastruktur yang tidak baik menyebabkan konektivitas antar wilayah terganggu. Masih ditemukannya jalan rusak sepanjang jalan Kab. Pemalang, jalan yang tidak memiliki draianase baik. Pelayanan angkutan juga menjadi salah satu penyebab konektifitas antar wilayah. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten

Pemalang dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi fluktuasi yaitu pada tahun 2016 sebesar 57,33% meningkat menjadi sebesar 59,80% pada tahun 2019 kemudian menurun menjadi sebesar 56,47% pada tahun 2020. Konektivitas ini juga memperlambat distribusi barang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kualitas lingkungan yang baik akan terlihat dari indeks kualitas lingkungan hidup. Pada dokumen RPJMN indeks kualitas lingkungan hidup kab kota minimal adalah 75. Untuk mencapai disana pencemaran air dan udara menjadi unsur penting. Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian Kabupaten, karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang. IKLH Kabupaten Pemalang baru mencapai 68,58 pada tahun 2020.

#### **4. Belum optimalnya Refomasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan inovasi daerah**

Reformasi birokrasi masih menjadi isu nasional. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum terlaksananya reformasi birokrasi secara optimal adalah Indeks Profesional Pegawai belum mencapai standar yang ditentukan, kompetensi ASN masih perlu dilakukan, Indeks Kematangan informasi masih belum dilaksanakan. Pengelolaan keuangan sudah mencapai WTP namun secara kualitas masih perlu mendapat perhatian. Maturitas SPIP dan akuntabilitas APIP telah mencapai level 3 untuk itu juga perlu dilakukan peningkatan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan korupsi di Kabupaten.

Selain itu indeks Sistem Pembangunan Berbasis Eleltronik juga belum maksimal. Pelayanan publik yang belum optimal juga menjadi terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah dalam mencapai reformasi birokrasi. Pelimpahan kewenangan OPD di Kecamatan bagian dari meningkat pelayanan publik yang lebih cepat. Belum semua OPD memberikan pelimpahan kewenangan di Kecamatan.

#### **5. Belum Optimalnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan**

Kemiskinan masih menjadi permasalahan di Kab. Pemalang. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar Kab. Pemalang memiliki angka kemiskinan sangat tinggi. Penanggulangan kemiskinan ini harus diselesaikan oleh banyak OPD, sehingga dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan perlu menjadi pegangan bagi OPD dalam penanganan kemiskinan. Peran masyarakat dan CSR juga belum optimal dalam membantu penanggulan Pada tahun 2020, Persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang sebesar 16,02%, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah sebesar 11,41% serta di atas Nasional sebesar 9,78%



Berikut disajikan tabel keselarasan isu strategis RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan isu RPJMN Tahun 2020-2024

**Tabel 4.1 Keselarasan Isu Strategis RPJMD dengan RPJMN**

No	Isu Strategis	
	RPJMD Kabupaten Pemalang	RPJMN 2020-2024
1	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya Saing dan pencapaian pelayanan dasar	Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
		Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa
		Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia
		Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti
		Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama
		Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan
		Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas
2	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi.	Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
		Kedaulatan pangan dan energi
3.	Masih Tingginya Kesenjangan antar wilayah	Pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan: (a) tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 18,0 persen, hampir dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang sebesar 10,3 persen; dan kemiskinan perdesaan yang tinggi (12,9 persen), hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7 persen) (BPS, 2019); (b) masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; (d) terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.
		Infrastruktur Pelayanan Dasar
		Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman
		Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan
		Keselamatan dan Keamanan Transportasi

No	Isu Strategis	
	RPJMD Kabupaten Pemalang	RPJMN 2020-2024
		Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur Infrastruktur Ekonomi Infrastruktur Perkotaan Transformasi Digital Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup
4.	Belum optimalnya Refomasi Birokrasi, Pelayanan Publik, dan inovasi daerah	Tata Kelola reformasi
5.	Belum Optimalnya Upaya Penanggulangan Kemiskinan	masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan: (a) tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 18,0 persen, hampir dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang sebesar 10,3 persen; dan kemiskinan perdesaan yang tinggi (12,9 persen), hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7 persen) (BPS, 2019); (b) masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; (d) terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

Berikut disajikan tabel keselarasan Isu strategis RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan Isu RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

**Tabel 4.2 Keselarasan Isu Strategis RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah**

No	Isu Strategis	
	RPJMD Kabupaten/Kota	RPJMD Provinsi
1	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan pencapaian pelayanan dasar	Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
2	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi.	Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha Kedaulatan pangan dan energi

3	Masih tingginya kesenjangan antar wilayah	Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam
		Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah
4	Belum optimalnya refomasi birokrasi, pelayanan publik, dan inovasi daerah	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah
5	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan

Berikut disajikan tabel keselarasan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025.

**Tabel 4.3 Keselarasan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pemalang dengan RPJPD Kabupaten Pemalang**

No	Isu Strategis	
	RPJMD Kabupaten Pemalang	RPJPD Kabupaten
1	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan pencapaian pelayanan dasar	mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas serta mampu mendukung eksistensi pembangunan daerah
2	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi.	mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah,
3	Masih tingginya kesenjangan antar wilayah	mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah,
5	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan	mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsi dalam menopang kehidupan masyarakat,
4	Belum optimalnya refomasi birokrasi, pelayanan publik, dan inovasi daerah	mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggung jawab sejalan dengan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur
		mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejuk dan damai didukung oleh penegakan supremasi hukum